



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

---

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2023 telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Ciamis adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lembaga/instansi. Inspektur Kabupaten Ciamis selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi :

- 1.Laporan Realisasi Anggaran
- 2.Neraca
- 3.Laporan Operasional
- 4.Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- 5.Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

## 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

---

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- o. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- P Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;  
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

### 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

#### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1.    Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2.    Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3.    Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II     Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

- 2.1.    Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2.    Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab III    Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

- 3.1.    Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 3.2.    Pos – Pos Neraca
- 3.3.    Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.4.    Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 3.5.    Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **Bab IV    Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

#### **Bab V     Penutup**



## BAB II

### IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 2.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

###### Program dan Kegiatan

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis 700/Kpts.685-Huk/2020 tanggal 29 Desember 2022 untuk Tahun Anggaran 2023 yang menjadi urusan kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

Kode	Program Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>output</i> )
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai
		Persentase Perangkat Daerah yang meningkat Predikat SAKIP nya
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah hasil temuan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemetaan resiko pengawasan
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan yang disusun
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang disusun
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu yang disusun
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah LHA yang diterbitkan

6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan
6.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Jumlah hasil temuan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi maturitas SPIP</b>
6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah pendampingan penegakan integritas yang dilaksanakan
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	nilai asistensi penilaian Reformasi Birokrasi
		Jumlah pendampingan dan asistensi penilaian Zona Integritas
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta perifikasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah tindak lanjut Monev terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil Penegakan Integritas yang disusun
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	- Nilai LHE AKIP - Level Maturitas SPIP - Kualitas Laporan Keuangan - IKM Inspektorat
6.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase administrasi perkantoran yang terpenuhi
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP
6.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran

6.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis perangkat daerah
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek
6.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen listrik/ penerangan
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan mamin dan ATK
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan penggandaan dan cetakan
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rakor dan konsultasi
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasioanl
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeler kantor
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga ahli yang tersedia
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan bangunan gedung kantor

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Per 31 Desember 2023	%
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>18.480.064.391</b>	<b>17.811.303.471</b>	<b>96,38</b>
<b>6.01.6.01.0.001.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.797.757.391</b>	<b>9.129.246.471</b>	<b>93,18</b>
6.01.6.01.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.150.000	6.150.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.962.000	1.962.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.929.517.391	8.261.391.071	92,52
6.01.6.01.0.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.982.000	1.982.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.250.000	23.250.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	128.655.000	128.527.000	99,90
6.01.6.01.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.825.000	8.825.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.207.800	54.207.800	100,00
6.01.6.01.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.125.000	24.125.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.745.200	21.745.200	100,00
6.01.6.01.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.800.000	13.800.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.618.000	45.618.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.07.05.	Pengadaan Mebel	-	-	-
6.01.6.01.0.001.2.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.520.000	45.520.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.925.000	2.925.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.050.000	82.793.400	99,69
6.01.6.01.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.000.000	276.000.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.875.000	40.875.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.750.000	22.750.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000	48.000.000	100,00
6.01.6.01.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.800.000	18.800.000	100,00
<b>6.01.6.01.0.002.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>8.326.808.000</b>	<b>8.326.558.000</b>	<b>100,00</b>
6.01.6.01.0.002.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.471.850.000	2.471.850.000	100,00
6.01.6.01.0.002.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	220.400.000	220.400.000	100,00
6.01.6.01.0.002.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	216.770.000	216.520.000	99,88
6.01.6.01.0.002.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	175.920.000	175.920.000	100,00
6.01.6.01.0.002.2.01.05.	Pengawasan Desa	2.220.210.000	2.220.210.000	100,00
6.01.6.01.0.002.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.910.638.000	1.910.638.000	100,00
6.01.6.01.0.002.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.111.020.000	1.111.020.000	100,00
<b>6.01.6.01.0.003.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>355.499.000</b>	<b>355.499.000</b>	<b>100,00</b>
6.01.6.01.0.003.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	87.905.000	87.905.000	100,00
6.01.6.01.0.003.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	162.838.000	162.838.000	100,00
6.01.6.01.0.003.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	104.756.000	104.756.000	100,00

## **2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

---

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2023 yang tidak mencapai 100% adalah:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 96,38%, dengan rincian subkegiatan realisasi masih rendah, yakni:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi 92,52% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan Kekosongan pejabat struktural dan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Nopember dan Bulan Desember yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 .
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi 99,90% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99,69% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.



## **BAB III**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Neraca Inspektorat menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca Inspektorat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp2.766.510.456,50 atau turun sebesar 8,31% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.017.323.199. Nilai Aset sebesar Rp2.766.510.456,50 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.623.500 dan Aset Tetap sebesar Rp2.764.886.956,50. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp763.773.099, dan Ekuitas sebesar Rp2.002.737.357,50, sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.766.510.456,50 atau turun sebesar 8,31% dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.017.323.199.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, diketahui bahwa realisasi Belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.811.303.471 atau mencapai 96,38% dari target anggaran sebesar Rp18.480.064.391. Apabila dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada tahun 2023 terdapat selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau defisit sebesar (Rp18.480.064.391).

Berdasarkan Laporan Operasional Inspektorat Kabupaten Ciamis yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/defisit dari Operasi, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa (defisit) Operasional Inspektorat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai Rp18.472.755.205,50 terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18.472.755.205,50 terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp18.472.755.205,50 sehingga terdapat (defisit) dari kegiatan operasional senilai Rp18.472.755.205,50

Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Ciamis yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.002.737.357,50 terdiri dari Ekuitas awal Rp2.658.055.758, RK PPKD Rp17.811.303.471, RK PPK Barang Rp6.133334 dikurangi defisit-LO sebesar Rp18.472.755.205,50.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

## 3.2. POS-POS LRA

## 3.2. POS-POS BELANJA- LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

## 3.2.2.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.811.303.471 atau mencapai 96,38% dari anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.480.064.391 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	%	REALISASI 2022
2	3	4	5	6
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	8.929.517.391,00	8.261.391.071,00	92,52	8.258.371.532,00
Belanja Barang dan Jasa	9.550.547.000,00	9.549.912.400,00	99,99	8.735.283.655,00
Belanja Modal	-	-		60.877.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.480.064.391,00</b>	<b>17.811.303.471,00</b>	<b>96,38</b>	<b>17.054.532.187,00</b>

## 3.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.261.391.071 atau mencapai 92,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.929.517.391, mengalami kenaikan sebesar Rp3.019.539 atau 0,04% dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.258.371.532 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Kenaikan/ (Penurunan)
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.261.391.071</b>	<b>8.258.371.532</b>	3.019.539	0,04
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.003.607.756</b>	<b>4.175.456.642</b>	(171.848.886)	(4)
Belanja Gaji Pokok ASN	2.698.239.200	2.812.831.300	(114.592.100)	(4)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	316.104.800	335.248.657	(19.143.857)	(6)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.725.000	146.790.000	(7.065.000)	(5)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	385.830.000	387.210.000	(1.380.000)	(0)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.660.000	33.620.000	(6.960.000)	(21)
Belanja Tunjangan Beras PNS	170.621.520	180.398.220	(9.776.700)	(5)

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.221.077	12.752.168	(531.091)	(4)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.981	33.544	2.437	7
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	232.020.502	243.611.956	(11.591.454)	(5)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.537.437	5.740.180	(202.743)	(4)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.612.239	17.220.617	(608.378)	(4)
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.257.783.315</b>	<b>4.082.914.890</b>	174.868.425	4
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.230.534.000	1.026.759.642	203.774.358	20
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	434.335.000	324.878.993	109.456.007	34
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.592.914.315	2.731.276.255	(138.361.940)	(5)

### 3.2.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa untuk per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.549.912.400 atau mencapai 99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.550.547.000, mengalami penurunan Rp814.628.745 atau 9,33% dibandingkan realisasi belanja barang jasa Tahun 2022 yakni sebesar Rp8.735.283.655 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Kenaikan/ (Penurunan)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.549.912.400</b>	<b>8.735.283.655</b>	<b>814.628.745</b>	<b>9,33</b>
Belanja Barang	436.450.000	546.377.200	(109.927.200)	(20,12)
Belanja Jasa	461.490.400	466.182.455	(4.692.055)	(1,01)
Belanja Pemeliharaan	114.800.000	104.260.000	10.540.000	10,11
Belanja Perjalanan Dinas	8.537.172.000	7.618.464.000	918.708.000	12,06

### 3.2.2.2. Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah nihil karena anggaran tahun 2023 sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar Rp60.877.000 atau 100% dibandingkan realisasi belanja modal Tahun 2022 yakni sebesar Rp60.877.000. Berikut rincian realisasi dan anggaran belanja modal per 31 Desember Tahun 2023 dan realisasi belanja modal Tahun 2022 :

No.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA MODAL</b>				
1	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	60.877.000,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan		-		
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.877.000,00</b>

### 3.3. POS-POS NERACA

3.3.1. ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.3.1.1 ASET LANCAR	Rp.1.623.000	Rp.4.189.500

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.623.000 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.189.500 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.566.500 atau (61,3)%. Nilai saldo Aset Lancar per per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.623.000 merupakan saldo Persediaan sebesar Rp.1.623.000

3.3.1.1.2. Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp.1.623.000	Rp.4.189.500

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.623.000 sedangkan nilai saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.189.500. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.623.000 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023
1.	Persediaan Habis Pakai	Rp4.189.500	Rp129.253.300	Rp 131.819.800	Rp1.623.000
2.	Persediaan Tak Habis Pakai				
3.	Persediaan untuk Diserahkan/ Dijual				
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>Rp4.189.500</b>	<b>Rp129.253.300</b>	<b>Rp 131.819.800</b>	<b>Rp1.623.000</b>

3.3.1.1.2.a. Persediaan Habis Pakai	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp.1.623.000	Rp.4.189.500

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.623.000 sedangkan nilai saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.189.500. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Pemegang Barang/Pengelola Barang pada Inspektorat Kabupaten Ciamis sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor.

Berikut rincian saldo persediaan habis pakai:

Jenis Persediaan	Jml Satuan	Harga	Jumlah
1.1.7.01.03.01.0024.-Ballpoint	11,0	4.000,00	44.000
1.1.7.01.03.01.0028.-Stabilo	7,0	8.000,00	56.000
1.1.7.01.03.01.0030.-Penghapus Pencil Kecil	22,0	5.000,00	110.000
1.1.7.01.03.01.0033.-Double Tape 6 mm	9,0	35.000,00	315.000
1.1.7.01.03.01.0057.-Map Jepit	25,0	1.500,00	37.500
1.1.7.01.03.01.0074.-Map Odner Folio Jeko	6,0	30.000,00	180.000
1.1.7.01.03.01.0075.-Map Snelhektek Folio SP 885	13,0	1.500,00	19.500

1.1.7.01.03.01.0081.-Pensil 2B	72,0	4.000,00	288.000
1.1.7.01.03.01.0083.-Lakban Putih	1,0	8.000,00	8.000
1.1.7.01.03.01.0085.-Lakban Hitam	10,0	18.000,00	180.000
1.1.7.01.03.01.0091.-Map Plastik Snalhektek	36,0	3.000,00	108.000
1.1.7.01.03.01.0111.-Map Biasa	150,0	750,00	112.500
1.1.7.01.03.02.0012.-Amplop Kecil	3,0	20.000,00	60.000
1.1.7.01.03.02.0013.-Amplop Besar	5,0	21.000,00	105.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.623.500</b>

<b>3.3.1.2. ASET TETAP</b>			
		<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	Aset Tetap sebelum Penyusutan	Rp.5.929.367.571,00	Rp.6.089.989.697,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.3.164.480.615,00	Rp.3.076.855.998,00
	Aset Tetap setelah Penyusutan	Rp.2.764.886.956,00	Rp.3.013.133.699,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.929.367.571 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.089.989.697, turun sebesar Rp160.622.126 atau sebesar (2,64%). Mutasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
	<b>Saldo awal Aset Tetap per 31 Desember 2022 (audited)</b>		<b>6.089.989.697,00</b>
1).	<b>Mutasi Penambahan :</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal	-	
	b. Hibah yang diterima	-	
	c. Koreksi Penambahan :		
	- Perolehan aset tetap dari non belanja modal	-	
	- Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi tambah)	-	
	d. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap	-	
	e. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	<b>12.800.000,00</b>	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
			<b>12.800.000,00</b>
2).	<b>Mutasi Pengurangan :</b>		
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	-	
	c. Koreksi pengurangan hasil		
	- Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	173.422.126,00	
	- Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/doble catat	-	
	- Reklas Menjadi Aset Tidak	-	
	- Pengurangan barang krn barang	-	
	- Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	
	- Pengurangan Proses TGR	-	
		<b>173.422.126,00</b>	
	d. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	
			<b>173.422.126,00</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2023</b>		<b>5.929.367.571,00</b>

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 tersebut di atas terdiri dari :

KODREK	URAIAN	SALDO AWAL per 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO AKHIR per 31 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1.3.1.01.01	Tanah	846.885.000,00	-	-	846.885.000,00
1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	3.074.906.713,00	12.800.000,00	173.422.126,00	2.914.284.587,00
1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	1.966.727.984,00			1.966.727.984,00
1.3.4.01.01	Jalan Irigasi dan Jaringan	201.470.000,00	-	-	201.470.000,00
1.3.5.01.01	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.089.989.697,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>173.422.126,00</b>	<b>5.929.367.571,00</b>

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.3.1.3.a.</b>	<b>Tanah</b>	<b>Rp.846.885.000</b>	<b>Rp.846.885.000</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.846.885.000 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.3.1.3.b.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp.2.914.284.587,50</b>	<b>Rp.3.074.906.71</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.914.284.587,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.074.906.713, mengalami penambahan sebesar Rp12.800.000 dan pengurangan sebesar Rp173.422.126 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
<b>1.</b>	<b>Saldo Awal per 31 Desember 2022</b>	Rp. 3.074.906.71
<b>2.</b>	<b>Mutasi Penambahan</b>	
	Realisasi Belanja Modal	Rp. 60.877.000
	Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	
	Reklasifikasi dari Belanja barang jasa yang diakui sebagai aset tetap peralatan mesin	
	Limpahan aset tetap dari SKPD	
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin dari SKPD	Rp. 12.800.000
	Koreksi tambahan hasil inventarisasi	
	Hibah/hadiah	
<b>3.</b>	<b>Mutasi Pengurangan</b>	
	Reklas Barang rusak berat & hilang ke aset lain	Rp 173.422.126
	Proses TGR karena barang hilang	
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin ke SKPD lain	
	Dihibahkan ke masyarakat	
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	
	Koreksi karena double catat	
	Koreksi kurang karena tidak masuk batas kapitalisasi	
	<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp. 2.914.284.587,50</b>

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Limpahan aset tetap dari SKPD sebesar Rp12.800.000 dengan rincian:

No.	Dari	Berita Acara Penyerahan Barang		Jenis Barang Yang Diterima	Jumlah Rp
		Tanggal	Nomor		
1	BPKD Kabupaten Ciamis	25 Januari 2023	024/185/BPKD.6/2023	Laptop	12.800.000
<b>Total</b>					<b>12.800.000</b>

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.3.1.3.c.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp.1.966.727.984</b>	<b>Rp.1.966.727.984</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.966.727.984 sama dengan saldo per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.3.1.3.d.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Rp.201.470.000</b>	<b>Rp.201.470.000</b>

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp.201.470.000 sama dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp.201.470.000.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.e.	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Rp.3.164.480.615</b>	<b>Rp.3.076.855.998</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.164.480.615 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.076.855.998 mengalami penambahan sebesar Rp.87.624.617. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. dengan rincian sebagai berikut:

KODREK	URAIAN	SALDO ASET per 31 DESEMBER 2022 (UN-AUDITED)	Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU ASET TETAP per 31 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.01.01	Tanah	846.885.000,00	-		-		846.885.000,00
1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	2.914.284.587,50	2.339.494.277,00	206.515.050,00	170.711.591,00	2.375.297.736,00	538.986.851,50
1.3.3.01.01	Gedung dan Bangunan	1.966.727.984,00	592.974.888,00	31.674.158,00		624.649.046,00	1.342.078.938,00
1.3.4.01.01	Jalan Irigasi dan Jaringan	201.470.000,00	144.386.833,00	20.147.000,00		164.533.833,00	36.936.167,00
1.3.5.01.01	Aset Tetap Lainnya	-	-		-		-
1.3.6.01.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-		-		-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.929.367.571,50</b>	<b>3.076.855.998,00</b>	<b>258.336.208,00</b>	<b>170.711.591,00</b>	<b>3.164.480.615,00</b>	<b>2.764.886.956,50</b>

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.3.2. KEWAJIBAN</b>	<b>Rp.763.773.099</b>	<b>Rp.359.267.441</b>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.763.773.099 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.359.267.441. Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Rp.763.773.099</b>	<b>Rp.359.267.441</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp763.773.099 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp359.267.441. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp.8.856.951 merupakan utang belanja jasa kantor dan Rp.754.916.148 merupakan utang belanja Gaji dan Tunjangan.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>Utang Belanja</b>	<b>Rp.763.773.099</b>	<b>Rp.359.267.441</b>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.763.773.099 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp359.267.441 merupakan utang belanja yang bersifat untuk kegiatan operasional belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik dan sebagainya pada bulan Desember 2023 sebesar Rp.8.856.951 yang manfaat ekonomis penggunaan jasa kantor tersebut telah dinikmati pada bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2024 sedangkan sebesar Rp.754.916.148 merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan Bulan Nopember dan Desember 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024.

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Air	117.000	117.000	117.000	117.000
Utang Belanja Telepon	120.000	118.500	120.000	118.500
Utang Belanja Listrik	6.757.987	8.621.451	6.757.987	8.621.451
<b>Jumlah</b>	<b>6.994.987</b>	<b>8.856.951</b>	<b>6.994.987</b>	<b>8.856.951</b>
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.594.504	20.570.863	9.594.504	20.570.863
Tambahan Penghasilan	342.677.950	734.345.285	342.677.950	734.345.285
<b>Jumlah</b>	<b>352.272.454</b>	<b>754.916.148</b>	<b>352.272.454</b>	<b>754.916.148</b>

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>3.3.3. EKUITAS</b>	<b>Rp.2.002.737.357,50</b>	<b>Rp.2.658.055.758,00</b>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.002.737.357,50 terdiri dari Ekuitas awal Rp2.658.055.758, RK PPKD Rp17.811.303.471, RK PPK Barang Rp6.133.334 dikurangi defisit-LO sebesar Rp18.472.755.205,50 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 yang

merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022	2.658.055.758,00	
2.	Surplus/Defisit Operasional	(18.472.755.205,50)	
3.	RK PPKD	17.811.303.471,00	
4.	RK PPKD Barang	6.133.334,00	
5.	Dampak Koreksi Kesalahan – Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	<b>Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023</b>	<b>2.002.737.357,50</b>	

### 3.4. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 3.4.2. Beban - LO

Realisasi Beban-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.472.755.205,50 terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp18.472.755.205,50, sedangkan realisasi Belanja-LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp.17.811.303.471 terdiri dari realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp.17.811.303.471. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp.17.811.303.471 dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp18.472.755.205,50 terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp661.451.734,5 disebabkan adanya tambahan beban utang belanja jasa kantor pada Bulan Desember 2023, adanya beban persediaan SKPD yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD per 31 Desember 2023 dan pembebanan penyusutan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH BELANJA LRA PER 31 Desember 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BELANJA LO PER 31 Desember 2023
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.811.303.471,00</b>			<b>18.472.755.205,50</b>
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.261.391.071,00</b>	754.916.148,00	352.272.454,00	<b>8.664.034.765,00</b>
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.549.912.400,00</b>			<b>9.554.340.364,00</b>
Belanja Barang	436.450.000,00	4.189.500,00	1.623.000,00	439.016.000,00
Belanja Jasa	461.490.400,00	8.856.951,00	6.994.987,00	463.352.364,00
Belanja Pemeliharaan	114.800.000,00			114.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	8.537.172.000,00			8.537.172.000,00
<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP</b>				<b>251.733.976,00</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.				199.912.818,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung				31.674.158,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan				20.147.000,00
<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN</b>				<b>2.646.100,50</b>
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain				2.646.100,50

### 3.4.2.1. Beban Operasional- LO

Beban Operasional – LO terdiri dari:

#### 3.4.2.1.a Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.283.648.883 lebih besar dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp8.258.371.532. Berikut rincian Beban Pegawai – LO:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Penambahan Hutang Belanja Pegawai Tahun Berjalan	Pengurangan Hutang Belanja Pegawai Tahun Berjalan	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2022
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.261.391.071</b>	<b>754.916.148</b>	<b>352.272.454</b>	<b>8.664.034.765</b>	<b>8.283.648.883</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.003.607.756</b>			<b>4.014.584.115</b>	<b>4.175.738.038</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	2.698.239.200			2.698.239.200	2.812.831.300
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	316.104.800			316.104.800	335.248.657
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.725.000			139.725.000	146.790.000
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	385.830.000			385.830.000	387.210.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.660.000			26.660.000	33.620.000
Belanja Tunjangan Beras PNS	170.621.520			170.621.520	180.398.220
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.221.077			12.221.077	12.752.168
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.981			35.981	33.544
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	232.020.502	20.570.863	9.594.504	242.996.861	243.893.352
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.537.437			5.537.437	5.740.180
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.612.239			16.612.239	17.220.617
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.257.783.315</b>	<b>734.345.285</b>	<b>342.677.950</b>	<b>4.649.450.650</b>	<b>4.107.910.845</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.230.534.000	218.988.000	78.191.000	1.371.331.000	1.002.739.321
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	434.335.000	74.242.000	25.754.000	482.823.000	316.147.134
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.592.914.315	450.115.285	238.732.950	2.795.296.650	2.789.024.390

Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 lebih besar dari Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo utang beban berjalan sebesar Rp754.916.148 dan adanya pengurangan akibat adanya pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp352.272.454.

Sedangkan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LO per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp8.283.648.883 terdapat kenaikan sebesar Rp380.385.882 atau 4,6%.

#### 3.4.2.1.b. Beban Barang dan Jasa - LO

Realisasi Beban Barang dan Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.733.374.569 atau lebih kecil Rp1.909.086 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.735.283.655. Berikut rincian Belanja Barang dan Jasa-LO:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Penambahan Hutang Belanja Dan Beban Persediaan Tahun Berjalan	Pengurangan Hutang Belanja Dan Beban Persediaan Tahun Berjalan	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2022
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.549.912.400</b>			<b>9.554.340.364</b>	<b>8.733.374.569</b>
Belanja Barang	436.450.000	1.623.000	4.189.500	439.016.000	544.081.900
Belanja Jasa	461.490.400	6.994.987	8.856.951	463.352.364	466.568.669
Belanja Pemeliharaan	114.800.000			114.800.000	104.260.000
Belanja Perjalanan Dinas	8.537.172.000			8.537.172.000	7.618.464.000

Realisasi Beban Barang dan Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.554.340.364 atau lebih kecil Rp4.427.964 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.549.912.400 yang disebabkan adanya pengurangan karena adanya pelunasan utang jasa kantor tahun lalu serta penambahan dan pengurangan beban persediaan tahun berjalan.

Sedangkan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa-LO per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp8.733.374.569 terdapat kenaikan sebesar Rp820.965.795 atau 9,4%.

#### a. Realisasi Belanja Barang

Belanja Barang per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis. Realisasi Belanja Barang-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp439.016.000 atau lebih kecil Rp2.295.300 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp436.450.000. Berikut rincian Belanja Barang-LO:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Penambahan Beban Persediaan Tahun Berjalan	Pengurangan Beban Persediaan Tahun Berjalan	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2022
<b>Belanja Barang</b>	<b>436.450.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>4.189.500</b>	<b>439.016.000</b>	<b>544.081.900</b>
Belanja Barang Pakai Habis	436.450.000	1.623.000	4.189.500	439.016.000	544.081.900

Realisasi Beban Barang -LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp544.081.900 atau lebih kecil Rp2.566.000 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang -LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp546.377.200 yang disebabkan adanya penambahan dan pengurangan beban persediaan tahun berjalan.

Sedangkan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang-LO per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp544.081.900 terdapat penurunan sebesar Rp105.065.900 atau 19,3%.

#### b. Realisasi Belanja Jasa

Belanja Jasa per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Jasa Kantor dan Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Realisasi Belanja Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp466.568.669 atau lebih besar Rp386.214 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp466.182.455. Berikut rincian Belanja Jasa-LO:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Penambahan Hutang Belanja Jasa Tahun Berjalan	Pengurangan Hutang Belanja Dan Jasa Tahun Berjalan	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2022
<b>Belanja Jasa</b>	<b>461.490.400</b>	<b>6.994.987</b>	<b>8.856.951</b>	<b>463.352.364</b>	<b>466.568.669</b>
Belanja Jasa Kantor	411.618.400	6.994.987	8.856.951	413.480.364	431.568.669

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	49.872.000			49.872.000	35.000.000
--	------------	--	--	------------	------------

Realisasi Beban Barang -LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp463.352.364 atau lebih besar Rp1.861.964 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp461.490.400 yang disebabkan adanya penambahan dan pengurangan hutang belanja jasa tahun berjalan.

Sedangkan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang-LO per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp466.568.669 terdapat kenaikan sebesar Rp3.216.305 atau 0,7%.

### c. Realisasi Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Realisasi Belanja Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.800.000 sama dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan LRA per 31 Desember 2023. Berikut rincian Belanja Pemeliharaan-LO:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Penambahan Belanja Pemeliharaan Tahun Berjalan	Pengurangan Belanja Pemeliharaan Tahun Berjalan	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2022
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>114.800.000</b>			<b>114.800.000</b>	<b>104.260.000</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.000.000			96.000.000	89.060.000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.800.000			18.800.000	15.200.000

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp104.260.000 terdapat kenaikan sebesar Rp10.540.000 atau 10,11%.

### d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas -LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.618.464.000 sama dengan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas LRA per 31 Desember 2023. Berikut rincian Belanja Perjalanan Dinas-LO:

Uraian	Jumlah Belanja LRA Per 31 Desember 2023	Penambahan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Berjalan	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun Berjalan	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2022
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.537.172.000</b>			<b>8.537.172.000</b>	<b>7.618.464.000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.537.172.000			8.537.172.000	7.618.464.000

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp7.618.464.000 terdapat kenaikan sebesar Rp918.708.000 atau (12,06%).

### 3.4.2.1.c Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp289.479.450,00 sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Beban LO Per 31 Desember 2023	Jumlah Beban LO Tahun 2022
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>289.479.450,00</b>	<b>289.479.450,00</b>
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>199.912.818,00</b>	<b>237.658.292,00</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	199.912.818,00	237.658.292,00
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>31.674.158,00</b>	<b>31.674.158,00</b>
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.674.158,00	31.674.158,00
<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b>	<b>20.147.000,00</b>	<b>20.147.000,00</b>
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.147.000,00	20.147.000,00
<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>2.646.100,50</b>	<b>0</b>
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	2.646.100,50	0

### 3.5. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp2.002.737.357,50 . Nilai Ekuitas Akhir Rp 2.002.737.357,50 terdiri dari Ekuitas awal Rp2.658.055.758, RK PPKD Rp17.811.303.471, RK PPK Barang Rp6.133.334 dikurangi defisit-LO sebesar Rp18.472.755.205,50. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

#### 3.5.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.658.055.758 Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*).

#### 3.5.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp18.472.755.205,50). Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp0. dikurangi Beban-LO sebesar (Rp18.472.755.205,50), dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023.



## **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 201 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat, Inspektorat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

### **4.1. Kedudukan**

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### **4.2. Tugas dan Fungsi**

#### **4.2.1. Tugas**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

#### **4.2.2. Fungsi**

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4.3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat
  1. Jabatan Fungsional Perencana
  2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Inspektur Pembantu Khusus
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4.4. Data SDM/Pegawai

Data SDM / pegawai pada Inspektorat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel ini:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	Pendidikan
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>				
1.	Drs. Syarief Nurhidayat, M.Si 19640920 199503 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Inspektur	S2
2.	H. Dody Nardyanto S, S.Sos 19651225 199003 1 003	Pembina, IV/a	Sekretaris	S1
3.	H. Herdiana, SE, M.Si 19731123 200212 1 005	Pembina Tk.I, IV/b	Inspektur pembantu Wilayah 1	S2
4.	Dania Rahayu, SE, MM 19810420 200212 2 004	Pembina Tk.I, IV/b	Inspektur Pembantu Wilayah II	S2
5.	Ani Hendayani, SE, MM 19760516 200604 2 004	Penata Tk.I, III/d	Inspektur Pembantu Wilayah IV	S2
6.	Rd. Syaiful Slamet, S.Hut 19730510 200312 1 005	Pembina, IV/a	Inspektur Pembantu Khusus	S1
7.	Ivan Adimulya, SE, M.Si., Ak. 19860613 200901 1 001	Penata, III/c	Kasubag. Administrasi dan Umum	S2
<b>JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DAN ANALIS KEBIJAKAN</b>				
8.	Yoppi Hidayat J, SE, MM 19730911 200901 1 001	Penata Tk.I, III/d	Perencana Ahi Muda	S2
9.	Agus Dedi Kurniadi, S.IP, MM 19740804 200501 1 007	Penata, III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN</b>				
10.	Ani Nita Anisah, SH, MM 19641101 199503 2 002	Pembina Tk.I, IV/b	Pengawas Pemerintahan Madya	S2
11.	Dede K. Permanasari, SH 19640110 199601 2 001	Pembina Tk.I, IV/b	Pengawas Pemerintahan Madya	S1
12.	Wiwin Kurniasih, S.Sos, M.Kes 19701015 199011 2001	Pembina, IV/a	Pengawas Pemerintahan Madya	S2
13.	Herawan Nurjaman, SH, M.Si 19770814 200312 1 004	Pembina, IV/a	Pengawas Pemerintahan Madya	S2
14.	Irmawati, S.IP, M.Si 19780805 200312 2 019	Pembina, IV/a	Pengawas Pemerintahan Madya	S2
15.	Heri Susanto, S.Sos 19820114 200604 1 007	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Pemerintahan Muda	S1
16.	Maman Suryaman, SH, M.Si 19730810 200312 1 005	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Pemerintahan Muda	S2
17.	Panji Hadian, SH, M.Si 19801022 201001 1 009	Penata, III/c	Pengawas Pemerintahan Muda	S2
18.	Ade Kusmayadi, S.IP 19821203 201001 1 005	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Pemerintahan Muda	S1
19.	Yaya Mulyana, S.IP 19690515 198903 1 003	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Pemerintahan Muda	S1
<b>JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR</b>				
20.	Drs. Kusjeu Kustedja 19681122 198803 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Auditor Madya	S1
21.	Drs. Ade Rusman 19680520 199301 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Auditor Madya	S1
22.	Didik Kartika Sejati, SE 19780421 200212 1 006	Pembina, IV/a	Auditor Madya	S1
23.	Yoyo Adia, S.IP 19760206 199503 1 001	Pembina, IV/a	Auditor Madya	S1
24.	Tatang Fauzy, ST 19710520 200312 1 003	Pembina, IV/a	Auditor Madya	S1

25.	Yani Dany Haryani, S.Sos 19670616 198812 1 002	Pembina, IV/a	Auditor Madya	S1
26.	Usep Sambas, S.IP 19651007 198712 1 002	Pembina, IV/a	Auditor Madya	S1
27.	Wahyudi Irawan, SE, MM 19780716 200112 1 004	Penata Tk.I, III/d	Auditor Muda	S2
28.	Heri Hendara, S.Sos 19740929 200701 1 004	Penata Tk.I, III/d	Auditor Muda	S1
29.	Nurdaniyal Suryaeltarlan, ST 19790608 200901 1 001	Penata, III/c	Auditor Muda	S1
30.	Dini Astuty, S.Sos, MM 19800401 201101 2 001	Penata, III/c	Auditor Muda	S2
31.	Ana Rosi Anggraeni, SE, MM 19810624 201001 2 001	Penata, III/c	Auditor Muda	S2
32.	Yosep Ananda, ST, MM 19851017 200901 1 004	Penata, III/c	Auditor Muda	S2
33.	Triardi Syamsudin, S.Sos, MM 19840211 200901 1 004	Penata, III/c	Auditor Muda	S2
34.	Agung Ekasetra Lesmana, ST 19830924 201101 1 001	Penata, III/c	Auditor Pertama	S1
35.	Acep Jaoharuddiin Syabani, SE 19940128 201903 1001	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
36.	Kiki Dela Resita, SE 19950319 201903 2003	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
37.	Asri Rahmawatie, SE 19890325 201903 2002	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
38.	Dede Rosita, S.Ak 199711252023032010	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
39.	Rifa Melidiana, S.Ak 199701212023032013	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
40.	PopY Octaviani, SE 199510172023032007	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
41.	Gema Valdi Ramadhan, SE 199402262023031006	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
42.	Indirawati Ruhiman, SE 19860719 202303 2 001	Penata Muda, III/a	Auditor Pertama	S1
43.	Aen Nurul Aenudin, S.Pt, MM 19821115 201101 1 001	Penata, III/c	Auditor Pertama	S2
<b>SUBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM</b>				
44.	Holih Rohman 19810424 201409 1 001	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SMA
<b>Subag Administrasi dan Umum</b>				
45.	Sri Agustini, SM 19810816 200901 2 002	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan	S1
46.	Netty Setiawati, A.Md 19740618 200604 2 010	Penata, III/c	Pengelola Kepegawaian	D3
47.	Asep Nursobah, S.IP 19680712 200701 1 021	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Sarana dan Prasarana	S1
48.	Elin Herlina, A.Md 19790323 201001 2 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Persuratan	D3
49.	Mulyana 19840226 201409 1 002	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	SMA
<b>SUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN</b>				
50.	Etin Supriatin 19730926 199803 2 006	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Umum	SMA

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Inspektorat Kabupaten Ciamis jumlah pegawai per 31 Desember 2023 sebanyak 50 orang, terdiri dari 7 orang Jabatan Struktural, 1 orang Jabatan Fungsional Perencana, 1 orang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, 24 orang Jabatan Fungsional Auditor, 10 orang Jabatan Fungsional P2UPD dan 7 orang fungsional umum (staf).

**BAB V**  
**PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Semester Pertama Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Januari 2024

INSPEKTUR  
KABUPATEN CIAMIS

Drs. SYARIEF NURHIDAYAT, M.Si  
NIP. 19640920 199503 1 001